

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah merupakan sebuah organisasi yang sangat kompleks karena melibatkan berbagai aspek, struktur dan fungsi dengan bertanggung jawab kepada masyarakat. Sebagai organisasi, keberadaan pemimpin menempati posisi yang sangat sentral dan dibutuhkan dalam menjalankan roda pemerintahan. Kepemimpinan merupakan faktor yang penting dalam mempengaruhi bawahan yang menentukan maju atau tidaknya suatu organisasi. Dalam organisasi pemerintahan, kepemimpinan memiliki pengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam keberjalanan tugas dan terselenggaranya pemerintahan, sebab dengan adanya kepemimpinan yang ditopang oleh sumber daya yang memadai, maka tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) akan tercapai, begitupun sebaliknya bahwa penyebab gagalnya kinerja birokrasi di Indonesia dikarenakan oleh faktor kelemahan kepemimpinan (Istianto, 2009).

Tolok ukur efektivitas pemimpin dalam organisasi pemerintahan salah satunya adalah kemampuan dalam mengambil keputusan politik, yakni keputusan yang memiliki kekuatan mengikat, memiliki pengaruh terhadap masyarakat umum dan berkaitan dengan kebijakan publik. Menurut Miriam Budiardjo, pengambilan keputusan dapat dipahami sebagai inti dari politik yang melibatkan keputusan-keputusan secara bersama-sama dan mengikat seluruh masyarakat. Keputusan ini dilaksanakan oleh organisasi sebagai pilihan

keputusan terbaik dari berbagai alternatif yang memiliki keterkaitan dengan kewenangan pemerintah dalam mengelola sebuah permasalahan. Pengambilan keputusan ini tentu tidak akan lepas dari lembaga pemerintah baik pemerintah level pusat sampai dengan level desa.

Sebagai organisasi pemerintahan level terendah yang memegang peranan penting dalam proses pemerintahan, desa memerlukan pemimpin sebagai dasar untuk menyelenggarakan pemerintahan yang menjalankan tugas dan fungsi dengan akuntabel sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa adalah desa dan desa adat atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa memiliki keberadaan yang paling dekat dengan masyarakat, sehingga desa merupakan pionir dari pemerintahan. Desa memiliki peran yang krusial dalam mengimplementasikan kedaulatan yang diamanatkan oleh undang-undang dasar sebagai upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Unsur dari terselenggaranya pemerintahan desa mencakup kepala desa dan perangkat desa atau sebutan lain. Perangkat desa meliputi sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, serta perangkat teknis.

Kepala desa merupakan unsur pemerintah yang memimpin penyelenggaraan pemerintah desa dan memiliki posisi jabatan yang setara dengan Badan

Permusyawaratan Desa. Sedangkan perangkat desa merupakan unsur yang memiliki tugas untuk membantu dan mendukung kepala desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Adapun tugas dari kepala desa yakni menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, serta pemberdayaan masyarakat desa. Salah satu kewenangan kepala desa dalam menjalankan tugasnya adalah merancang serta menetapkan peraturan desa. Perencanaan peraturan desa merupakan sebuah elaborasi atas otoritas desa, yang didasarkan pada kebutuhan dan keadaan desa setempat, serta merujuk pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Proses penyusunan peraturan desa wajib bersifat demokratis dan melibatkan peran serta dari masyarakat. Sebab masyarakat berhak untuk memberikan saran, usulan atau memberi masukan baik kepada BPD ataupun kepala Desa dalam proses pembentukan peraturan desa (Sitorus dkk, 2007).

Dalam proses pengambilan keputusan di desa, keputusan yang diambil diklasifikasikan ke dalam dua jenis. Pertama, keputusan bersifat informal dan memiliki aspek sosial yang mengikat masyarakat secara bebas. Kedua, keputusan bersifat formal yang dibentuk oleh entitas formal desa. Bentuk keputusan yang informal, dalam proses pengambilan keputusan dilaksanakan sesuai kesepakatan bersama, yang sebelumnya telah dibahas terlebih dahulu oleh tokoh desa yang dianggap memiliki kewibawaan tertentu (Kushandajani, 2008). Sementara bentuk keputusan formal, dalam proses pengambilan keputusan mengacu pada sistem yang telah diputuskan bersama, misalnya proses Musyawarah Pembangunan Desa (Musbangdes) yang diselenggarakan

setiap tahun. Dalam proses pengambilan keputusan tersebut dilaksanakan oleh entitas yang memiliki fungsi tersebut sesuai dengan hukum, dan selanjutnya disebut sebagai Peraturan Desa (Perdes). Peraturan desa juga merupakan sebuah kebijakan yang dibentuk guna melayani kepentingan umum dan memberi manfaat bagi masyarakat desa, untuk melindungi dan memelihara hak dan kepentingan desa sebagai upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat. Adapun produk hukum di lingkungan pemerintahan desa meliputi, keputusan kepala desa, keputusan kepala desa yang bersifat pengaturan, keputusan kepala desa yang bersifat penetapan, keputusan bersama kepala desa, dan instruksi kepala desa.

Secara umum desa identik dipimpin oleh seorang kepala desa laki-laki. Sebab sistem sosial di kehidupan masyarakat masih memposisikan kepemimpinan laki-laki memegang peranan yang lebih signifikan dalam sektor publik dibandingkan dengan pemimpin perempuan (Fitriani, 2015). Perempuan dipandang mempunyai keberadaan di bawah dan dikendalikan oleh laki-laki serta dianggap menyalahi kodrat apabila terjun ke dunia politik (Elizabeth, 2018). Selain itu, perempuan dianggap sebagai sosok yang identik memiliki sifat ragu, tidak tegas, terlalu perasa, dan mental yang mudah goyah. Anggapan masyarakat ini masih mendominasi dalam kehidupan masyarakat desa dimana budaya patriarki masih sangat kental (Sulistyo, 2019). Budaya patriarki merupakan budaya yang mengabaikan kesetaraan dan kesetimbangan sehingga menjadikan perempuan menjadi tidak penting dan tidak layak mendapat perhatian (Sakina & A., 2017). Sehingga budaya ini berimplikasi terhadap

adanya kesenjangan dan ketidakadilan gender sebagai kontrol utama dalam masyarakat. Keadaan ini menjadi sebuah factor penghambat perempuan dalam berpartisipasi untuk berkontestasi menjadi seorang pemimpin di level desa. Hal ini menunjukkan bahwa adanya diskriminasi klasik terhadap perempuan dalam publik (Rasdiyanah, 1999).

Walaupun hambatan partisipasi perempuan ini masih mengiringi, namun kepemimpinan perempuan dalam mengambil peran yang strategis dalam sistem pemerintahan sudah mengalami kemajuan. Pada umumnya, perempuan mempunyai karakteristik mendasar sebagai seorang pemimpin yakni kecenderungan lebih sabar, mempunyai empati yang besar, mampu *multitasking* serta mempunyai kemampuan dalam menjalin jaringan sehingga memudahkan dalam proses bernegosiasi (Fitriani, 2015). Perempuan juga mempunyai sifat demokratis dan rasa kepedulian yang tinggi, maka dari itu kondisi ini menjadikan perempuan mempunyai kompetensi guna menjadi seorang pemimpin dalam sebuah organisasi (Eagly & Johnson, 1990). Salah satu tolok ukur dalam efektivitas dalam menduduki jabatan sebagai pemimpin dalam organisasi pemerintahan yakni kemampuannya dalam mengambil keputusan, terutama keputusan yang berhubungan dengan publik. Kecepatan dan keakuratan dalam pengambilan keputusan merupakan unsur penting bagi seorang pemimpin. Karena keputusan yang ditentukan oleh pemimpin akan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup dari organisasi tersebut.

Berkaitan dengan proses pengambilan keputusan, menurut penelitian Mc. Coby dan Jacklin menyatakan bahwa laki-laki memiliki keunggulan daripada

perempuan, dalam hal kemampuan matematik. Sedangkan perempuan lebih unggul dalam kecakapan verbal. Untuk seorang pemimpin, kemampuan matematik sangat diperlukan dalam sebuah perencanaan jangka panjang yang pasti dan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Kemampuan yang tidak dimiliki oleh perempuan ini menjadikan pemimpin perempuan cenderung kurang percaya diri dalam pengambilan keputusan dan seringkali dianggap lamban ketika bekerja (Ancok:1995). Selain itu, laki-laki memiliki kepribadian yang agresif daripada perempuan, sehingga dalam memimpin laki-laki lebih cepat dalam mengambil keputusan daripada perempuan yang cenderung lama. Perbedaan lain yang ditemukan adalah bahwa laki-laki dapat mengetahui secara cepat inti dari sebuah permasalahan, sedangkan perempuan dengan kemampuannya cenderung melihat aspek-aspek dari suatu permasalahan daripada inti permasalahan (Ancok, 1995). Di samping itu, perempuan dapat bersikap tegas sekaligus lemah lembut, bersikap sabar dalam menentukan tujuan dan mampu untuk memahami situasi terutama ketika harus mengambil sebuah keputusan yang berhubungan dengan kepentingan umum.

Berdasarkan paparan yang telah dijelaskan, terdapat setidaknya isu penting yang penting ditelaah bahwa seorang perempuan pun mampu melaksanakan kepemimpinannya dengan baik. Menurut data statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Boyolali pada tahun 2020, Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Boyolali sebesar 94,19 dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk jenis kelamin perempuan sebesar 73,48 dan laki-laki sebesar 78,01. Capaian IPG Kabupaten Boyolali pada tahun 2020 menempati

peringkat ke-13 terbesar jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Boyolali terdiri dari 22 kecamatan dan 261 desa.

Menurut data dari Dispermasdes Kabupaten Boyolali terdapat 19 kepala desa perempuan dari 261 desa yang terpilih secara demokratis melalui Pilkades serentak pada tahun 2019. Di Kecamatan Sawit, hanya terdapat satu kepala desa perempuan yakni Evy Nurdina. Keunikan dari Evy Nurdina beliau merupakan kepala desa perempuan pertama yang menjabat di Desa Guwokajen dimana latar belakang beliau merupakan seorang ibu rumah tangga dan belum pernah menjabat sebagai perangkat desa. Akan tetapi beliau aktif di kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan pemerintah desa bersama suaminya yang menjabat sebagai seorang perangkat desa. Beliau juga aktif di organisasi PKK dan Kader Posyandu Desa Guwokajen sebagai wujud dari partisipasi perempuan. Dengan keaktifan beliau, mayoritas masyarakat Guwokajen mengusungkan dan mendukung Evy Nurdina sebagai calon kepala desa dan pada akhirnya beliau memenangkan kontestasi pemilihan kepala desa pada tahun 2019 dengan mendapatkan suara sejumlah 45,3% dari 1.957 yang berhasil mengalahkan 4 calon kepala desa laki-laki dan menjabat sampai dengan saat ini.

Selama kepemimpinan beliau, menurut pengamatan penulis dan pendapat masyarakat dalam hal pengambilan keputusan publik baik formal maupun informal untuk menyelesaikan suatu permasalahan, beliau cenderung bersifat demokratis dan melibatkan partisipasi dari masyarakat. Dalam pengambilan

keputusan formal atau pembentukan peraturan desa bersama BPD dan perangkat desa, beliau selalu melihat kondisi dan keadaan desa setempat. Kepala desa juga belum pernah mengalami hambatan dimana seluruh perangkat desanya adalah laki-laki. Kepala desa dan perangkat desa berkolaborasi dengan baik untuk mencapai tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik. Berdasarkan uraian latar belakang yang menyatakan bahwa perempuan mengalami kesenjangan dan ketidakadilan gender sebagai kontrol utama dalam masyarakat, namun secara empiris berkebalikan dengan fenomena yang terjadi di Desa Guwokajen. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti terkait kepemimpinan perempuan secara teoritis yang diimplementasikan dalam proses pembentukan peraturan desa oleh kepala desa perempuan Desa Guwokajen, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah dipaparkan, penelitian ini akan difokuskan ke dalam bentuk rumusan masalah, yakni: Bagaimana kepemimpinan perempuan Kepala Desa Guwokajen dalam proses pengambilan keputusan desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka penelitian ini memiliki tujuan yakni untuk menganalisis kepemimpinan perempuan Kepala Desa Guwokajen dalam proses pengambilan keputusan desa.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan kemaslahatan dalam pengembangan keilmuan dengan menambah literatur ilmu politik dan pemerintahan terkait isu kepemimpinan perempuan dalam pemerintahan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini, penulis dapat mengetahui realita secara konkrit terkait kepemimpinan kepala desa perempuan Desa Guwokajen dalam proses pengambilan keputusan desa. Hasil dari penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan referensi kepada penelitian selanjutnya terkait perempuan dalam birokrasi pemerintahan khususnya pemerintahan desa.

1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berkaitan dengan kepemimpinan perempuan dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintahan di Indonesia telah banyak dilakukan baik di pemerintahan pusat sampai dengan pemerintahan desa. Penelitian terdahulu yang dimanfaatkan sebagai referensi dalam penelitian ini berkaitan dengan kepemimpinan perempuan di dalam pemerintahan. Referensi ini memiliki konsep, dimensi dan indikator yang berbeda namun dapat dijadikan sebagai tinjauan pustaka sebagai berikut:

Pertama, penelitian oleh (Febrianti, 2020) tentang Peranan Kepemimpinan Wanita dalam Jabatan Publik di Kantor Bappeda Kota Mataram, bertujuan untuk memahami peran kepemimpinan perempuan dalam posisi publik di

Kantor Bappeda Kota Mataram serta untuk mengidentifikasi factor yang mempengaruhi kontribusi kepemimpinan perempuan dalam jabatan tersebut di Kantor Bappeda Kota Mataram. Penelitian ini memanfaatkan pendekatan kualitatif. Penelitian ini mengadopsi Teori Peranan, Teori Kepemimpinan, dan Teori Kepemimpinan Wanita. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa adanya kepemimpinan perempuan di Kantor Bappeda Kota Mataram diterima dengan positif serta tidak ditemukan perbedaan signifikan antara pemimpin perempuan dengan laki-laki dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan mereka.

Kedua, penelitian oleh (Prayoga, 2023) tentang Partisipasi Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan Berbasis Adat di Desa Adat Ketewel Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar Provinsi Bali, bertujuan untuk memahami, menganalisis dan mengelaborasi partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan berbasis adat desa serta factor-faktor penghambatnya. Penelitian ini memanfaatkan pendekatan kualitatif. Penelitian ini mengadopsi teori Partisipasi Cohen dan Uphoff (1977) serta beberapa teori pendukung lain seperti pengambilan keputusan dalam menganalisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan tidak diikutsertakan secara langsung dalam proses pengambilan keputusan adat, akan tetapi perempuan lebih diikutsertakan dalam pengimplementasian keputusan yang membawa manfaat yang diperoleh perempuan dari keputusan adat menjadi minimal. Evaluasi pengambilan keputusan mengungkapkan bahwa perempuan telah diberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasi berupa kritik dan saran, akan tetapi

kesempatan ini belum dimanfaatkan perempuan dengan baik karena cenderung menghindari perselisihan.

Ketiga, penelitian oleh (Anwar dan Herviyanto, 2023) yang berjudul Gaya Kepemimpinan Perempuan dalam Proses Kemajuan Pembangunan di Desa (Studi pada Kepemimpinan Seorang Kepala Desa Perempuan di Desa Karangjati Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi), bertujuan untuk menilai gaya kepemimpinan perempuan yang diterapkan dalam keberhasilan dalam pembangunan dengan berfokus pada aspek pengambilan keputusan, pola komunikasi, penentuan arah dan memotivasi, dan pengawasan. Penelitian ini menggunakan teori Gaya Kepemimpinan dan Teori Pemimpin Perempuan dengan memanfaatkan metode deskriptif kualitatif. Temuan penelitiannya yakni dalam pengambilan keputusan, kepemimpinan kepala desa perempuan ini memiliki kecenderungan gaya kepemimpinan demokrasi relatif dengan melibatkan partisipasi masyarakat berupa aspirasi dalam setiap perumusan dan perencanaan kebijakan. Komunikasi antara kepala desa perempuan dengan perangkat desa berlangsung dengan baik, dan kepala desa sering berfungsi sebagai fasilitator untuk memberikan informasi serta konsultasi mengenai program-program dan rancangan kegiatan pembangunan. Dalam hal memotivasi, kepala desa perempuan menentukan tujuan pembangunan yang jelas dan terstruktur serta menanamkan komitmen bersama untuk mengembangkan desa secara optimal yang mencerminkan gaya partisipasi seorang pemimpin. Pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala desa perempuan meliputi pengawasan langsung dan tidak langsung melalui gaya

kepemimpinan kemitraan yang menegaskan bahwa kepala desa dan perangkat desa memiliki posisi yang setara dalam mengawasi kegiatan pembangunan yang sedang berlangsung.

Terdapat beberapa perbedaan indikator antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan yakni terkait locus penelitian. Belum terdapat penelitian mengenai analisis kepemimpinan perempuan di Desa Guwokajen, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali. Selanjutnya pada fokus penelitian, penulis memiliki fokus terhadap kepemimpinan perempuan dalam proses pengambilan keputusan desa di pemerintahan Desa Guwokajen. Studi di Desa Guwokajen menunjukkan urgensi manakala data menunjukkan hanya ada satu perempuan sebagai kepala desa di 12 desa di Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali.

1.6 Landasan Teori

1.6.1 Teori Kepemimpinan

Terdapat berbagai definisi kepemimpinan yang direpresentasikan oleh para ahli dengan perspektif yang berbeda-beda. Seseorang yang melaksanakan fungsi kepemimpinan secara umum disebut sebagai “pemimpin” atau menurut istilah dalam Bahasa Inggris disebut sebagai *leader*. Definisi pemimpin menurut (Griffin, 2003) adalah individu yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain tanpa harus mengunggulkan kekerasan; pemimpin merupakan individu yang telah diakui oleh orang lain bahwa dirinya mempunyai posisi sebagai seorang pemimpin.

Menurut (Kartono, 1998) kepemimpinan merupakan individu dalam organisasi yang paling memiliki pengaruh bagi kegiatan organisasinya dan berperan utama untuk menetapkan dan mencapai tujuan organisasi. Pemimpin merupakan penyalur ide, perbuatan, dan aktivitas yang mempunyai sifat mempengaruhi dan dapat menyelesaikan pekerjaan. Dalam hal ini menyiratkan bahwa pemimpin konsisten meliputi berbagai hal kekuasaan. Secara umum, menurut (Rivai, 2012) kepemimpinan memiliki beberapa indikator yakni:

1. Mempunyai sifat adil

Di sebuah organisasi terdapat kegiatan dimana rasa kebersamaan antara anggota merupakan hal yang mutlak, karena pada hakikatnya rasa kebersamaan ini merupakan refleksi dari kemufakatan antara pemimpin dengan bawahan ataupun antar para bawahan itu sendiri guna mencapai tujuan bersama organisasi.

2. Memberi sugesti

Secara umum sugesti dapat dimaknai sebagai saran atau rekomendasi. Arti sugesti dalam istilah kepemimpinan, diartikan sebagai suatu pengaruh dan hal lain sebagainya yang mempunyai kemampuan untuk menyentuh hati orang lain. Hal ini juga memainkan peran utama dalam mengendalikan dan meningkatkan harga diri serta rasa komitmen, keterlibatan, dan kebersamaan antara para bawahan.

3. Mendukung tujuan

Dalam organisasi, tujuan yang telah ditetapkan tidak dapat secara langsung dapat tercapai, akan tetapi harus mendapat dukungan dari kepemimpinan.

Oleh sebab itu, supaya organisasi mampu mencapai tujuan yang sudah diputuskan dengan efektif, maka perlu adanya penyesuaian antara setiap tujuan yang akan dicapai terhadap keadaan organisasi dan memungkinkan adanya keterlibatan bawahan untuk bekerjasama.

4. Katalisator

Seorang pemimpin bisa dinyatakan mempunyai peran sebagai katalisator, jikalau pemimpin itu konsisten mampu meningkatkan kualitas berbagai sumber daya yang tersedia, berupaya memberikan reaksi yang menumbuhkan semangat dan daya kerja cepat yang semaksimal mungkin.

5. Menciptakan rasa aman

Setiap pemimpin memiliki kewajiban dalam mewujudkan rasa aman untuk seluruh bawahannya. Hal ini hanya bisa dilakukan oleh pemimpin yang mempunyai kemampuan dalam mengelola hal-hal yang positif, sikap optimis ketika menghadapi berbagai persoalan, sehingga bawahan dapat merasakan rasa aman dalam menjalankan tugas-tugasnya yakni terlepas dari perasaan yang gelisah, penuh rasa khawatir, dan mendapatkan keamanan yang terjamin dari pimpinan.

6. Sebagai wakil organisasi

Dalam organisasi, setiap bawahan ketika melaksanakan pekerjaan pada sebuah bidang akan sering mempunyai sudut pandang bahwa pimpinan atau atasannya memiliki kontribusi dalam seluruh bidang aktivitasnya, terutama yang menerapkan prinsip-prinsip keteladanan. Dengan kata lain, segala

perilaku, perbuatan, dan kata-kata dalam setiap pemimpin akan memberikan dampak dan pengaruh tertentu terhadap organisasinya.

7. Sumber inspirasi

Pada dasarnya, sosok pemimpin merupakan sumber semangat untuk para bawahannya. Oleh sebab itu, pemimpin seharusnya konsisten mampu membangunkan semangat bagi para bawahan sehingga secara antusias bawahan dapat mengetahui tujuan organisasi yang telah diputuskan dan mampu bekerja dengan berorientasi pada tercapai tujuan organisasi dengan efektif.

8. Bersikap menghargai

Pada hakikatnya individu menginginkan adanya pengakuan dan pengharagaan diri kepada orang lain. Dengan begitu, tiap bawahan di dalam organisasi membutuhkan akan pengakuan dan penghargaan dari atasan atau pimpinan. Sehingga, hal ini menjadikan pemimpin memiliki kewajiban supaya menyerahkan penghargaan atau *reward* dan pengakuan dengan berbagai bentuk kepada bawahannya.

Dari beberapa klasifikasian dapat ditarik konklusi terkait pengertian kepemimpinan, dimana terdapat dua kata dominan yakni pengaruh dan mempengaruhi sehingga penulis menarik garis besar bahwa kepemimpinan merupakan sebuah proses mempengaruhi, memotivasi, membimbing, mengajak dan menginspirasi orang lain untuk bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu dalam organisasi.

1.6.2 Kepemimpinan Perempuan

Peran perempuan dalam jabatan strategis di pemerintahan telah mengalami kemajuan. Kaum perempuan dapat menunjukkan keberhasilannya ketika menjadi seorang pemimpin yang mana memiliki kecenderungan lebih sabar, mempunyai empati, dan mampu *multitasking* serta mampu untuk membangun jaringan dan melakukan negosiasi (Fitriani, 2015). Pemimpin perempuan dalam organisasi pemerintah juga tidak kalah dengan pemimpin laki-laki (Putranto & Surya Perdhana, 2018). Menurut (Putranto & Surya Perdhana, 2018), pemimpin perempuan mempunyai sifat yang berbeda dengan pemimpin laki-laki, yakni dengan klasifikasi sebagai berikut:

1. Komunikatif, komunikasi yang dilakukan pemimpin perempuan menggunakan pendekatan interpersonal, keterikatan, kekeluargaan, dan cenderung informatif.
2. Empati, pemimpin perempuan mempunyai perhatian yang lebih kepada bawahan baik di dalam pekerjaan ataupun di luar pekerjaan.
3. Direktif, pemimpin perempuan dapat memberikan contoh yang jelas.
4. Pengembangan, pemimpin perempuan berupaya mengembangkan kemampuan bawahan melalui berbagai macam cara.

Menurut (Cannor, 1996:30), kepemimpinan perempuan memiliki kelebihan dalam memimpin bawahannya, yakni:

1. Perempuan identik mempunyai sifat yang lembut, tenang, dan rendah hati.
Tentu saja, sifat ini tidak sama dengan sifat laki-laki, dan hal ini menciptakan ciri yang khas perempuan dalam memimpin yakni sifat

rendah hatinya yang dapat memunculkan rasa nyaman bagi bawahannya. Sebab, pemimpin dapat beradaptasi dengan dimana pun keberadaannya dan tidak merasa adanya batasan antara bawahan dengan atasan. Dalam memecahkan dan menyelesaikan permasalahan, perempuan memiliki ketenangan dalam berfikir dan hal ini merupakan kelebihan seorang pemimpin perempuan karena permasalahan tidak akan pernah berakhir apabila tidak dikelola dengan pikiran yang tenang. Pada umumnya sifat lembut perempuan akan mendorong kondisi kerja menjadi lebih kondusif karena ketika memberi perintah dan saran kepada bawahannya selalu diungkapkan menggunakan tutur kata yang halus.

2. Perempuan mempunyai sifat analisis dan hati-hati. Hal ini merujuk pada sifat hati-hati terkait pengambilan keputusan yang akan diterapkan sebagai peraturan desa ataupun untuk masa depan desa yang dia pimpin. Setiap terdapat permasalahan yang menjadi tantangan bawahannya ataupun permasalahan personal dalam kehidupannya, perempuan akan menganalisisnya terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan.
3. Perempuan memahami dan mengerti apa keinginan bawahannya. Pemimpin selalu menerima dengan lapang dada terkait kritik dan saran yang disampaikan bawahannya dan memberi umpan balik untuk memberi motivasi kinerja bawahannya.

Dalam organisasi pemerintahan, kedudukan perempuan dalam pekerjaannya mempunyai tanggung jawab dalam menyongsong tantangan dan

hambatan dari posisi pekerjaannya. Terdapat lima ciri-ciri kepemimpinan perempuan menurut (Fitriani, 2015) yakni:

1. Kemampuan akan membujuk. Secara umum, pemimpin perempuan cenderung lebih persuasif apabila dibandingkan dengan laki-laki. Mempunyai kecenderungan lebih berambisi dalam mengatakan “ya” yang berimplikasi pada peningkatan ego dan kepuasan diri. Walaupun demikian, sisi social, feminism, dan sifat empati dalam memaksakan kehendak akan tetap ada.
2. Pembuktian terhadap kritikan yang salah, “belum bermuka tebal” merupakan sebutan untuk pemimpin perempuan karena mempunyai ego yang lebih kecil daripada laki-laki yang artinya mereka masih dapat merasakan saksi atas penolakan dan kritikan. Akan tetapi, pemimpin perempuan akan lebih segera pulih dengan cara belajar dari kesalahan dan bergerak maju dengan sikap positif “akan saya buktikan” atas keberanian, empati, keluwesan, dan keramahannya yang tinggi.
3. Mempunyai semangat kerja tim. Pemimpin perempuan yang hebat mempunyai kecenderungan untuk mengimplementasikan gaya kepemimpinan secara komprehensif ketika memecahkan persoalan dan mengambil keputusan. Mereka cenderung fleksibel, penuh pertimbangan dalam mengambil keputusan serta tidak sungkan membantu staffnya. Walaupun demikian, perempuan dalam menyelesaikan masalah dan pengambilan keputusan perlu belajar dari laki-laki.

4. Sang pemimpin. Pemimpin perempuan yang hebat secara general mempunyai karisma yang kuat, mereka persuasif, percaya diri, serta mempunyai kemauan yang kuat untuk menyelesaikan tugas dan energik.
5. Berani mengambil resiko. Dalam pengambilan risiko, tidak ada tempat yang aman, pemimpin perempuan pada hakikatnya tidak takut melanggar regulasi dan mengambil risiko, sama halnya dengan laki-laki yang memberi atensi pada detail. Mereka merefleksikan di luar batasan-batasan organisasi dan tidak sepenuhnya menaati aturan structural yang ada seperti regulasi dan kebijakan organisasi.

1.6.3 Teori Pengambilan Keputusan

Menurut Devis dalam (Mulyaningsih, 2020), keputusan merupakan hasil dari penyelesaian permasalahan yang dihadapi dengan kuat. Situasi ini berhubungan dengan respon atas pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan unsur-unsur dalam sebuah perencanaan. Keputusan bahwasanya dapat dipahami sebagai upaya yang dilakukan untuk menelaah suatu permasalahan. Hasil akhir dari proses telaah atau analisis adalah kesimpulan yang kemudian digunakan sebagai dasar pertimbangan guna membuat suatu keputusan. Selanjutnya keputusan ini disebut sebagai hasil dari proses pemikiran yang berupa pemilihan salah satu alternatif yang dianggap paling efektif untuk menyelesaikan sebuah masalah (Mulyaningsih, 2020).

Menurut Kamus Besar Ilmu Pengetahuan, definisi pengambilan adalah penentuan keputusan atau kebijakan yang berdasar pada parameter tertentu. Sementara menurut Knootz dalam kutipan Nimran, definisi pengambilan

keputusan merupakan penetapan langkah atau tindakan dari beberapa alternatif yang berupa konotasi fisik, usaha-usaha kreatif, atau tempat mengumpulkan dan menampung pemikiran, perasaan, dan pengetahuan. Pengambilan keputusan dapat dipahami sebagai prosedur yang terorganisir terhadap sumber masalah yang sedang terjadi, penyusunan fakta serta data, penentuan yang matang dari berbagai pilihan yang sedang dihadapi dan mengambil langkah paling tepat menurut perhitungan. Pengambilan keputusan menekankan pada kebenaran dalam melakukan analisis unsur permasalahan yang terdapat dalam jangkauan organisasi, dengan mengikutsertakan seluruh pihak yang terkait dalam proses tersebut. Di berbagai organisasi mana pun, memperlihatkan bahwa pengambilan keputusan merupakan sebuah peran dan tanggung jawab terpenting, khususnya bagi seorang pemimpin yang baik dalam organisasi tersebut. Jadi, dapat ditarik konklusi bahwa pengambilan keputusan dapat diartikan sebagai pilihan atau alternatif dengan mengambil langkah sesuai dengan perhitungan. Pada dasarnya keberhasilan dan kegagalan pemimpin dalam pengambilan keputusan menjadi parameter nilai baik dan buruknya prestasi bagi seorang pemimpin.

Dalam proses pengambilan keputusan terdapat komponen yang paling penting yakni upaya penyusunan berbagai informasi sebagai komponen masukan dalam proses tersebut. Jika informasi yang diperoleh untuk merinci berbagai alternatif, maka keputusan dapat diambil dengan lebih akurat (Mulyaningsih, 2020). Sebuah keputusan diambil untuk meraih

tujuan yang sudah direncanakan. Terdapat langkah-langkah yang harus dilaksanakan secara terstruktur dalam proses pengambilan keputusan. Adapun langkah-langkah tersebut menurut Radford (1984) dapat diklasifikasikan ke dalam tiga fase, yakni

1. Penyelidikan (*intelligence*), yakni proses mengelaborasi perspektif dan penyusunan situasi, yang diartikan sebagai proses pengidentifikasian terkait dengan kondisi keputusan serta penafsiran dari karakteristik masalah.
2. Desain (*design*). yakni perincian dari sebagian alternatif yang ada. Fase ini juga merupakan proses perencanaan tahap-tahap tindakan yang mungkin diidentifikasi serta dirumuskan secara jelas.
3. Pilihan (*choice*). Fase ini mengenai tahapan pemilihan langkah sebagai tindak lanjut dari analisis beberapa alternatif pilihan. Fase ini juga merupakan penetapan langkah-langkah yang sejalan dengan tujuan yang sudah ditentukan.

Sementara menurut Pidarta dalam (Mulyaningsih, 2020) dalam memecahkan masalah terbagi menjadi enam langkah, yakni:

1. Mengidentifikasi masalah
2. Mengumpulkan data atau informasi yang sesuai dengan masalah
3. Menyusun berbagai alternatif solusi pemecah masalah
4. Menguraikan dampak dari setiap alternatif
5. Memilih salah satu alternatif solusi yang paling optimal
6. Menerapkan alternatif yang dipilih dan mengevaluasi hasilnya

1.7 Operasionalisasi Konsep

Untuk menjawab penelitian ini, penulis menggunakan teori yang relevan dengan apa yang akan penulis teliti, yakni teori kepemimpinan perempuan dan teori pengambilan keputusan. Teori ini dapat dijadikan acuan dalam menganalisis kepemimpinan perempuan dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian melalui teori tersebut penulis dapat mengetahui bagaimana kepemimpinan kepala desa perempuan dalam melakukan proses pengambilan keputusan di pemerintah desa.

Tabel 1.1 Operasionalisasi Konsep

Teori	Konsep	Definisi Konsep
Kepemimpinan Perempuan	Kemampuan akan membujuk	Kepala desa perempuan cenderung persuasif dalam proses pengambilan keputusan untuk pembentukan peraturan desa.
	Pembuktian terhadap kritikan yang salah	Kepala desa perempuan mampu menerima kritikan dan masukan baik dari perangkat desa maupun masyarakat setempat.
	Mempunyai semangat kerja tim	Kepala desa perempuan mampu mengimplementasikan kepemimpinannya secara komprehensif dalam memecahkan persoalan dan mengambil keputusan dengan penuh pertimbangan dan mampu membantu perangkat desa untuk bersama-sama menyelesaikan masalah.
	Sang pemimpin	Kepala desa perempuan memiliki rasa percaya diri dan mempunyai kemauan yang kuat dalam pengambilan keputusan untuk menyelesaikan permasalahan.
	Berani mengambil resiko	Kepala desa perempuan berani mengambil resiko dan tetap mentaati peraturan desa.

Pengambilan Keputusan	Penyelidikan (<i>intelligence</i>)	Kepala desa perempuan mampu menguraikan persepsi dan perumusan situasi, dalam arti proses identifikasi tentang situasi keputusan serta definisi dari karakteristik masalah.
	Desain (<i>design</i>)	Kepala desa melakukan proses penyusunan langkah-langkah tindakan yang mungkin diidentifikasi dan diformulasikan secara jelas.
	Pilihan (<i>choice</i>)	Kepala desa menentukan langkah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Desain Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memilih metode kualitatif sebagai model pendekatan penelitian yang diterapkan guna memahami pokok permasalahan. Penekanan dalam pendekatan kualitatif adalah berfokus pada pemberian makna dan interpretasi penulis sebagai pengungkapan atas apa yang didapatkan dari fakta empiris yang didukung oleh data yang relevan (Moeleong, 2013). Dalam hal ini, pengumpulan data bukan hanya terpaku pada teori, melainkan adanya sinkronisasi dengan fenomena yang berlangsung di lapangan. Penelitian ini tergolong tipe penelitian jenis kualitatif deskriptif untuk mengilustrasikan suatu situasi penelitian dan menelaah akibat suatu gejala secara komprehensif mengenai pokok bahasan yang didasarkan pada data, peristiwa, dan fenomena yang kemudian dilakukan analisis dan penguraian dalam bentuk tulisan yang relevan dengan tujuan penelitian ini.

Berdasarkan pada definisi di atas penulis ingin mengetahui proses pengambilan keputusan yang dilakukan kepala desa perempuan di Desa Guwokajen pada perspektif yang dilihat dari kepemimpinan perempuan yang berangkat dari stereotip gender dalam kepemimpinan yang membedakan pemimpin laki-laki dan mempengaruhi proses pengambilan keputusan.

1.8.2 Situs Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kantor Desa Guwokajen yang beralamat di Desa Guwokajen, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Lokasi tersebut diperlukan penulis guna mengumpulkan data dan informasi berdasarkan kebutuhan penelitian, karena penelitian ini berfokus pada kepemimpinan kepala desa perempuan dalam proses pengambilan keputusan oleh kepala desa perempuan di Desa Guwokajen.

1.8.3 Subjek Penelitian

Pemilihan subjek penelitian yang akan diteliti atau dimintai data ataupun keterangan ini memanfaatkan metode *purposive sampling*, yakni merupakan metode pemilihan sumber data dengan mempertimbangkan kriteria tertentu, misalnya subjek dianggap sebagai otoritas atau menguasai pengetahuan tentang apa yang diharapkan, sehingga memudahkan penulis untuk mengkaji objek situasi social yang diteliti (Sugiyono, 2015). Adapun yang menjadi subjek penelitian tersebut diantaranya yakni

1. Evy Nurdina, A.Md selaku Kepala Desa Guwokajen
2. Andi Prasetyo selaku Sekretaris Desa
3. Maryani selaku anggota BPD

4. Kusyanto selaku Kepala Dusun II
5. Subakdi, S.Pd selaku Kepala Urusan Umum dan Perencanaan
6. Suradi selaku Kepala Seksi Pelayanan

1.8.4 Jenis Data

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini yakni pendekatan kualitatif melalui pelaksanaan penelitian dalam kondisi yang alamiah (*natural setting*) atau penelitian dilaksanakan dengan menyesuaikan kondisi objek lingkungan yang sebenarnya (Sugiyono, 2015). Dengan digunakannya metode penelitian kualitatif, maka bentuk data yang didapatkan berupa tulisan, frasa atau ciri-ciri yang menggambarkan seseorang, tindakan, serta kejadian pada fenomena social.

1.8.5 Sumber Data

Sumber data yang diterapkan dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua:

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang didapatkan secara langsung oleh pengumpul data dari sumbernya (Sugiyono, 2015). Data didapatkan melalui pengamatan langsung di lapangan dan wawancara dengan informan. Dalam mendapatkan data primer, penulis melaksanakan observasi atau pengamatan terhadap situasi dan kondisi di lingkungan yang menjadi objek penelitian. Di samping itu, penelitian juga melaksanakan wawancara secara mendalam dengan para subjek penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang didapatkan oleh pengumpul data secara tidak langsung, misalnya melalui individu lain atau melalui dokumen data (Sugiyono, 2015). Data tersebut didapatkan dari hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya yang dilaksanakan oleh peneliti lain. Untuk mendapatkan data sekunder, penulis menggunakan sumber yang berasal dari buku, jurnal, artikel, dan pengumpulan dokumen pendukung.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian terdapat hal tidak boleh diabaikan yakni terkait bagaimana penulis mengumpulkan data. Sebab data yang diperoleh dan dikumpulkan akan menjadi penentu keabsahan dan validitas penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini yakni:

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui cara menukar ide dan informasi antara dua orang melalui pertanyaan dan tanggapan untuk menciptakan makna seputar suatu topik tertentu (Sugiyono, 2015). Informasi dan keterangan yang diperoleh dari narasumber dapat dimanfaatkan sebagai data untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini penulis akan melaksanakan tanya jawab untuk menggali pertanyaan kepada informan, yakni meliputi Kepala Desa, Perangkat desa, anggota BPD, tokoh agama dan masyarakat setempat desa. Wawancara akan dilakukan secara langsung ataupun *via phone* dan *via chat*

yang disesuaikan dengan kondisi di lapangan setelah menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini merupakan teknik pengumpulan data melalui sumber lain yang relevan dengan penelitian sebagai untuk melengkapi lubang-lubang dalam metode wawancara. Langkah lain yang dapat diterapkan untuk mengumpulkan data yakni dengan mengambil foto dari dokumen pendukung dalam bentuk *hard file* dan mengumpulkan salinan data jika dalam bentuk *soft file*.

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data merupakan proses penyusunan informasi yang dilakukan secara terstruktur dari hasil wawancara, notulensi di lapangan, serta sumber lain seperti dokumentasi kemudian mengklasifikasikannya ke dalam format yang dapat dipahami dan hasil penelitian dapat disampaikan kepada orang lain (Bogdan dalam Sugiyono, 2015). Teknik analisis data penelitian ini menerapkan model analisis secara interaktif dan berkesinambungan sampai tuntas (Miles & Huberman, 1984). Menurut (Miles & Huberman, 1984) analisis data terbagi dalam tiga tahapan, yakni diantaranya:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan rangkuman dan mereduksi berarti membuat rangkuman, mengklasifikasikan hal-hal pokok, atau tahapan yang dilakukan penulis ketika melaksanakan penyaringan data yang diperlukan untuk menjawab rumusan masalah dan menyingkirkan data yang kurang relevan.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan himpunan data dan informasi yang sistematis sebagai tahapan untuk mensinkronisasi data-data yang tersaring guna penarikan simpulan yang disajikan dalam teks naratif supaya mendapatkan keselarasan dalam menjawab permasalahan penelitian.

c. Penarikan Kesimpulan

Tahapan setelah melaksanakan proses pengumpulan data adalah penarikan simpulan sebagai tahapan terakhir untuk memberikan makna atau interpretasi dari temuan baru yang belum ditemukan sebelumnya berdasarkan semua hal yang terdapat dalam reduksi dan sajian data.

1.8.8 Kualitas Data

Indikator penting yang menandai validitas penelitian adalah kualitas dan ketepatan metode. Menurut (Creswell, 2009), dalam penelitian kualitatif, makna dari validitas adalah sebagai usaha untuk memeriksa keakuratan hasil penelitian melalui serangkaian penggunaan prosedur-prosedur tertentu. Suatu data yang dapat dikatakan sebagai data yang valid adalah ketika informasi yang didapatkan dari sumber-sumber yang terkait tidak mempunyai perbedaan terhadap realita yang berlangsung di lapangan.

Teknik pengecekan validitas data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi. Triangulasi merupakan pengecekan kembali data-data supaya terbukti keabsahannya setelah memperoleh data dari informan melalui waktu maupun alat berbeda dalam penelitian kualitatif. Adapun cara-cara yang dilakukan penulis dalam triangulasi yakni sebagai berikut:

1. Melakukan pencocokan data hasil wawancara antar informan.
2. Melakukan uji silang data yang didapatkan dari informasi terhadap temuan di lapangan.
3. Melaksanakan konfirmasi dan validasi data melalui sumber lain apabila terdapat kesalahan dalam pengumpulan data atau menambahkan data apabila masih kurang sehingga informasi yang dilaporkan sama dengan apa yang dimaksud informan.